

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Muaro Jambi salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintahan kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 1999. Pusat pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota di kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di Bukit Cinto Kenang kecamatan sekernan. Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara sabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah.¹ Kedekatam yang dimaksud adalah kedekatan dari segi geografis dan politik. Secara politik wilayah wilayah di Jambi bagian Hilir pernah satu Kabupaten yakni Jambi Hilir atau Batanghari

Kabupaten Muaro Jambi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten

¹ *Kabupaten muaro jambi dalam angka 2022 (pdf)*. www.muarojambikab.bps.go.id. hlm. 8, 48, 105–106. Diakses tanggal 2 April 2022.

Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas wilayah.

a.Kecamatan Jambi Luar Kota;

b.Kecamatan Sakernan;

c.Kecamatan Kumpeh Ulu;

d.Kecamatan Maro Sebo;

e.Kecamatan Kumpeh; dan

f.Kecamatan Mestong.

Pada tahun 1991-2001 Batanghari yang dipimpin oleh Bupati H.M. Saman Chatib, SH, sejalan dengan reformasi atau tuntutan otonomi dari kabupaten Batanghari.Berdasarkan UU. No. 54 tahun 1999 dimekarkan kembali menjadi 2, yakni Kabupaten Batanghari yang beribukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beribukota Sengeti yang peresmian dilakukan oleh Mendagri di Jakarta bulan Oktober 1999.

Dengan dibentuknya Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Batang Hari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Kabupaten Muaro Jambi mempunyai batas wilayah:

A. sebelah utara dengan Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

B. sebelah Timur dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu,

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

C. sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan; dan

- D. sebelah barat dengan Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.²

Meskipun secara administrasi dan tata kelola pemerintahan antara Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batanghari telah dipisahkan, akan tetapi latar sejarah, kebudayaan dan adat kedua daerah bersaudara ini memiliki akar rumpun dan suku yang sama, maka untuk masalah sejarah kebudayaan dan adat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bersama rakyat harus memiliki pola pikir yang sama untuk membangun dan mempertahankan nilai nilai sejarah dan kebudayaan.

Dari penjelasan diatas maka dapat diatrik kesimpulan bahwa Otonomi Daerah merupakan suatu keadaan yang dimana memungkinkan suatu daerah agar dapat mengaktualisasikan segala yang dimilikinya secara optimal. Pelaksanaan dari Otonomi Daerah itu sendiri telah memasuki babak baru setelah DPR sepakata dalam mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan di berlakukannya undang-undang tentang otonomi tersebut telah memberikan sebuah kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas lagi.³

Dalam UUD NO 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Muaro Jambi dinyatakan bahwa alasan terjadinya pemekaran karena sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan provinsi Jambi terkhusus Kabupaten Muaro Jambi, adanya aspirasi yang berkembang, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan melihat perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, ekonomi, social politik dan meningkatnya beban tugas serta

²Diakses dalam . www.muarojambikab.bps.go.id. tanggal 2 April 2022.

³Menurut KBBI **de·sen·tra·li·sa·si** //désentralisasi/ n1 sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah;2penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya);

volume bidang kerja dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Muaro Jambi.

Desa Muaro Jambi secara administratif berada dalam wilayah kecamatan marosebo kabupaten Muaro Jambi. Sebelum kabupatern Muaro jambi dimekarkan dari kabupaten Batanghari, desa Muaro Jambi tergabung dalam kecamatan sekernan kabupaten Batanghari. Berdasarkan arah mata angin kabupaten Muaro Jambi secara kewilayahan berbatasan dengan beberapa wilayah, Antara lain: di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Danau Lamo, sebagai penanda perbatasan adalah candi kedaton. Di sebelah timur, desa Muaro jambi berbatasan dengan Kemingkarluar dan Muaroselat. Sementara disebelah selatan berbatasan dengan Kemingking Dalam.⁴

Pemerintah desa Muaro Jambi terdiri atas 2 dusun, Dusun Sungai Melayu dan Dusun Sungai Kelari, kedua wilayah dusun ini terdiri dari 9 Rt, Rt 1-5 dimiliki oleh dusun Sungai Melayu dan Rt 6-9 di miliki dusun Sungai Kelari. Secara adat wilayah Muaro Jambi digambarkan dalam piagam Muaro Jambi yang berbunyi:

“Dari Muaro selat menyebrang ke tango papan

Dari Tanggo papan terus ke Buluran Bumban

Terus ke pinang rajo Mengkuang

Berlayar menyebrang olak tahi besi

Dari sini langsung ke sungai seno (kedaton)

⁴Mundardjito.2009. Muaro Jambi dulu sekarang dan esok. Badan Arkeologi Palembang: Palembang.

Langsung keliling

Langsung ke hilir

Sampai ke duren sekat

Langsung ke selat”⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di atas, untuk mempermudah dalam penelitian dan pembahasan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Umum Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa Yang Melatarbelakangi Pemekaran Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apa Saja Pengaruh Pemekaran Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Di Wilayah Muaro Jambi?

⁵Mundardjito.2009. Muaro Jambi dulu sekarang dan esok. Badan Arkeologi Palembang: Palembang.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan kajian baik batasan spasial maupun batasan temporal. Berdasarkan dari judul yang diangkat “**Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 1997-2000**” maka batasan spasial yang diambil penulis ialah wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari, Provinsi Jambi.

Batasan temporal atau waktu yang diangkat disini ialah tahun 1997-2000. Alasan penelitian ini diawali tahun 1997 karena adanya putusan dari pemerintah tentang pemekaran di setiap wilayah Indonesia. Pada tahun ini juga dianggap tahun titik dari penentuan pemekaran Muaro Jambi karena diakhir orde baru banyak tuntutan demi tuntutan nasib daerah. Batasan akhir yang diangkat disini ialah 2000 karena di tahun ini proses dari pemekaran wilayah dan dampak yang dirasakan oleh kabupaten Muaro Jambi berdampak langsung terhadap masyarakat. Tahun ini diambil karena pasca pemekaran tahun 1999 dan pada tahun 2000 inilah gejolak pembangunan daerah oleh Kabupaten Muaro Jambi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui bagaimana terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi
3. Untuk mengetahui pengaruh pemekaran muaro Jambi

1.5. Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menambah wawasan dan pengetahuan, dan juga menjadi acuan dalam membuat sebuah kajian tentang sejarah social.

2. Dari segi praktis, diharapkan agar semakin banyak yang membahas sejarah tentang Muaro Jambi, pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar tidak dilupakan dan juga menjadi semangat untuk anak local menggali lagi dan menulis sejarah-sejarah tentang Muaro Jambi yang belum terungkap.

1.6 Tinjauan Pustaka

Untuk menjadi acuan dari tulisan ini, penulis telah melakukan riset ke beberapa perpustakaan dan kantor Arsip Provinsi. Sejauh ini penulis hanya mendapatkan tulisan mengenai pemekaran wilayah dan juga pemisahan suatu wilayah dari wilayah inti (Muaro Jambi dan Batanghari) untuk membentuk Daerah Tingkat I Provinsi salah satu contohnya ialah Provinsi Jambi. Tetapi belum ada peneliti yang menulis spesifik tentang pemekaran kabupaten Muaro Jambi. Akan tetapi ada beberapa tulisan yang bisa dijadikan perbandingan dan juga acuan dalam tulisan ini dan permasalahan apa saja yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Mundarjito yang berjudul "*Muaro Jambi dulu sekarang dan esok*". Dalam buku ini membantu penulis dalam melihat konsep apa itu Muaro Jambi dilihat dari Budaya, Politik atau Bahasa istilah. Penelitian ini memiliki perbedaan diantaranya adalah tentang fokus yang dikaji. Penulis memfokuskan pada pembentukan Muaro Jambi. Sedangkan pada kajian ini hanya melihat Muaro Jambi sebagai Jendela budaya.
2. Kedua skripsi dari Wiwik Yulianingsih yang berjudul "*Sejarah Kota Mojokerto (1918-1942)*", skripsi ini membahas tentang perkembangan kota Mojokerto Pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah sejak dibentuknya gemeente sangat tampak pada pembangunan sarana fisik. Meski pembangunan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi warga Eropa, namun masyarakat Indonesia juga ikut merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan pasar, gedung pemerintahan, perbaikan jalan dan kampung, pemandian umum dan pengadaan air bersih. Pendidikan yang dilaksanakan di Mojokerto pun masih belum begitu terencana, sekolah-sekolah resmi baru didirikan pada akhir tahun 1940. Sedangkan untuk hiburan pada waktu itu masih berupa wayang, panggung sandiwara dan bioskop, yang kemudian menimbulkan dampak sosial dari diberlakukannya desentralisasi di Mojokerto menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Mulai dari pencurian, pembunuhan, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh gemeente.

3. Ketiga skripsi dari Vera Vidiana Rika yang berjudul “Sejarah Kota Lubuksikaping Masa otonomi Daerah (2000-2015)”, skripsi ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik kota pada masa otonomi daerah. Kota Lubuksikaping setelah adanya Undang-undang otonomi daerah lebih menunjukkan eksistensinya sebagai Ibukota Kabupaten, setelah Kabupaten Pasaman terbagi dua pada tahun 2002 menjadi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kota Lubuksikaping yang merupakan ibukota Kabupaten Pasaman semakin maju baik itu dalam perubahan fisik kota, adanya sarana-sarana kota. semakin ditambah adanya sarana pendidikan, perkantoran, pasar dan transportasi. Hal ini diiringi dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
4. Karya ke empat adalah Jurnal yang ditulis oleh Erdianto yang berjudul “Perkembangan Kelembagaan Dari Negeri Dan Marga Menjadi Desa Di kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi” Dalam jurnal ini membahas tentang

sejarah perkembanagan dari mulai marga hingga menjadi desa selain itu juga jurnal ini membahas tentang hukum dan peraturan daerah otonomi terkecil di Inidonesia

Kesamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tema pokok yaitu mengenai Pemekaran suatu wilayah terutama di Muaro Jambi yang saat itu dijadikan sebagai pemerintahan dibawah Kabupaten, kemudian pembahasan mengenai Sistem Pemerintahan serta terbentuknya sebuah Kabupaten. Akan tetapi terdapat Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian diatas adalah dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada masa sebelum terjadinya pemekaran dan sudah terjadinya pemekaran.

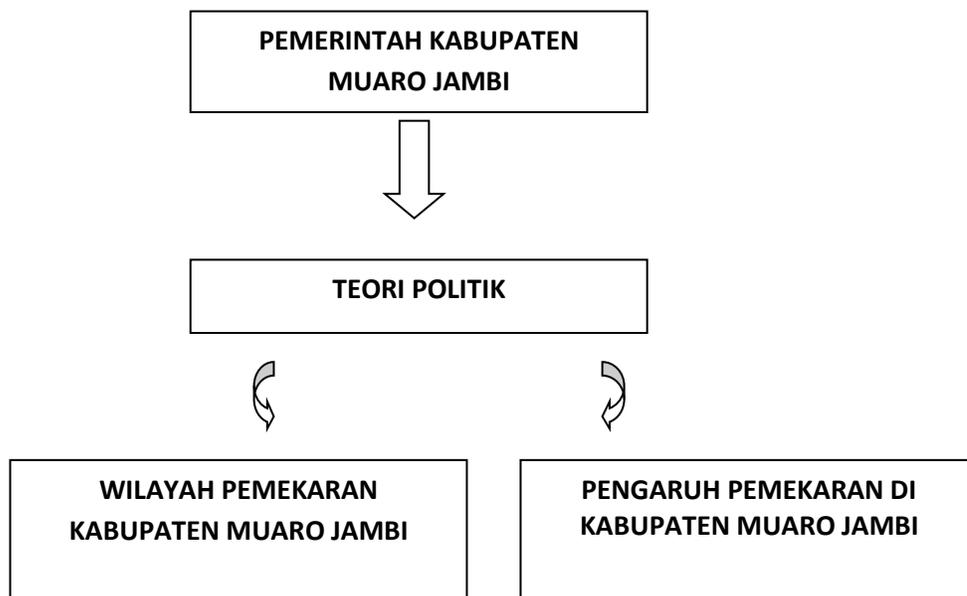
1.7 Landasan Teori

Terjadinya dinamika perubahan dalam birokrasi Pemerintahan tentu memberi dampak perubahan bagi masyarakat baik itu dari segi Sosial, Ekonomi dan Politik sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Perubahan Sosial sebagai landasan teorinya. Perubahan Sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai suatu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, baik itu dalam lingkup lokal maupun global. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat statis melainkan dinamis dan heterogen.⁶Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan,

⁶ Syaifudin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modren: Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), hlm. 78.

dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.⁷

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah yang meliputi segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁸Dengan demikian yang terjadi dalam Kewedanaan Jambi Luar Kota sejak tahun 1963 Kewedanaan Jambi Luar Kota berubah sttaus menjadi Kecamatan. Sehingga ditariklah kerangka berpikir sebagai berikut:



⁷ Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2020) hlm.20

⁸ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perubahan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 4.

1.8 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara, jalan, untuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan penelitian berarti penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong dan menolak suatu teori. Metode penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan, menguji, dan menganalisis sumber-sumber yang tersedia.⁹

Dalam melakukan pengumpulan sumber ini menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu dan pada prinsipnya penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus bersusun berkesinambungan. Penelitian dimulai dari hasrat keinginan atau permasalahan, kemudian diteruskan dengan penelaan landasan teoritis dalam kepustakaan untuk mendapat jawaban sementara (hipotesis), kemudian dirancang dan dilakukan pengumpulan data (fakta) untuk menguji hipotesis melalui analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya¹⁰

Penulisan sebuah rangkaian peristiwa sejarah yang bersifat sistematis dan objektif maka perlu diperhatikan empat langkah utama dalam kegiatannya. Keempat langkah tersebut ialah pertama usaha mencari, mengumpulkan jejak atau sejarah masa lampau, kedua usaha untuk meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, ketiga menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan yang lain yang mewujudkan peristiwa tertentu, langkah keempat menyampaikan hasil rekonstruksi masa lalu melalui penulisan sejarah.

⁹ Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pegantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Betung Budaya, 1995)

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan tahapan - tahapan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹¹

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani (*heurisein*) yang mempunyai arti menemukan, maka dari itu heuristik tidak memiliki peraturan-peraturan umum, jadi heuristik secara sederhana merupakan tahap proses menemukan, menangani dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, menurut Lucey, heuristik ialah kesaksian dalam informasi yang perlu dilakukan untuk kegiatan penelitian.¹²

Heuristik adalah usaha menemukan sumber-sumber sejarah yang nantinya dapat dipercaya dan mampu menjelaskan persoalan-persoalan penting yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian sejarah.¹³

pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber sumber yang relevan dengan kajian penelitian ini. Pertama, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematik dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Kedua, penulis juga mencari sumber-sumber tertulis yang terdapat di perpustakaan baik itu di perpustakaan Prodi Ilmu Sejarah Universitas Jambi, perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Wilayah Jambi, maupun Perpustakaan Umum Kota Jambi, serta Kantor Kearsipan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Ketiga, penulis melakukan wawancara terhadap subjek yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian seperti melakukan wawancara terhadap tokoh saksi sejarah pada masa Kewedanaan, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat, dan tokoh pemerintahan Kabupaten Muara Jambi.

¹¹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007. Hlm 68

¹² Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), Hal. 28

¹³ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016). Hlm. 35.

Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu: sumber primer dan sumber sekunder.

1. Kritik Sumber

Setelah mendapatkan sumber yang cukup, selanjutnya penulis mengawalinya dengan membaca secara cermat sumber sejarah berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dilakukan untuk proses pengujian kebenaran data dalam berbagai kategori yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber penulis yang dimaksud adalah sudah teruji keasliannya (otentitas) dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan penyelidikan fakta-fakta dengan melakukan pengujian terhadap dokumen. Kritik intern bertujuan untuk mengungkapkan apakah isi sumber yang dipergunakan dapat dipercaya atau tidak, dengan cara membandingkannya dengan sumber yang lain, kemudian dengan cara menganalisa kebenaran terhadap informasi atau sumber agar mendapat jawaban apakah sumber informasi ini relevan dengan penelitian atau tidak. Sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan cara memperhatikan aspek fisik dan menganalisis kebenaran, seperti apakah sumber itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak yang ejaannya, bagaimana gaya tulisannya, kertasnya, tintanya dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autensitasnya.

Kritik sumber sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin otentik penelitian sejarah tersebut.

2. Interpretasi

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau pemberian kesan, pendapat serta pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Interpretasi terdiri atas analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, dalam suatu sumber sejarah terkandung

beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut yang telah disaring dalam tahapan verifikasi, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Proses penyusunan, merangkai antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain sehingga dapat menjadi satu-kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang ada dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan, tetapi harus dipilih mana yang lebih relevan dengan gambaran penelitian yang diambil sehingga lebih jelas untuk mendiskripsikan topik yang dibahas.¹⁴

Apabila penulis tidak mendapat data yang lebih valid, maka sumber yang telah diuji kebenaran dan keotentikannya itu, penulis jadikan kesimpulan akhir, hasil dari kesimpulan tersebut yang telah dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian ini. Masuk dalam tahap berikutnya yaitu tahapan penulisan skripsi.

3. Historiografi

Historiografi dapat diartikan sebagai penghasil karya atau suatu proses penulisan sejarah. Karya tersebut dapat berupa buku sejarah, artikel, skripsi, tesis maupun karya-karya tulisan sejarah lainnya yang hasil akhirnya dapat dipertanggung jawab secara kejadiannya, sehingga suatu karya sejarah akan bersifat obyektif.

Historiografi telah melewati beberapa proses penyaringan hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan, kemudian fakta tersebut ditulis dan disajikan secara kronologis dan sistematis dalam bentuk penulisan. Penulisan ini terdiri dari tiga

¹⁴ Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, (Yogyakarta:Betung Budaya, 1995). Hlm. 101.

pembahasan pokok yaitu: pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang dibagi dalam bab-bab sesuai dengan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan 1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Ruang Lingkup, 1.4 Manfaat dan Tujuan, 1.5 Tinjauan Pustaka, 1.6 Kerangka Konseptual, 1.7 Metode Penelitian dan 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II POTRET KABUPATEN MUARO JAMBI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Gambaran kabupaten Muaro Jambi seperti 2.1 Geografis, 2.3 Demografis, 2.4 Keadaan Sosial Budaya

BAB III LATAR BELAKANG SEJARAH PEMEKARAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Dalam Bab ini akan membahas lebih Lanjut 3.1 Sejarah Muaro Jambi dan 3.2 Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IV DAMPAK DAN HASIL AKHIR DARI PEMEKARAN TERHADAP MASYARAKAT MUARO JAMBI

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan Muaro Jambi pasca pemekaran yang meliputi 4.1 Perekonomian, 4.2 Sosial Budaya, 4.3 Pariwisata dan Kesehatan

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran berdasarkan hasil penelitian.